

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian di Negara Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara yang dibuktikan oleh kontribusi sektor pertanian di PDB Indonesia sebesar 13,41% pada tahun 2014-2017 (BPS, 2018). Peran strategis tersebut salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk. Padi adalah tanaman pangan strategis karena merupakan kebutuhan pokok bagi lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia. Nilai absolut dari kontribusi pertanian terhadap PDB merupakan jumlah yang cukup besar, sehingga perlu dianalogikan bahwa petani wajib menerima pendapatan yang memadai untuk dapat sejahtera. Fakta yang terjadi apabila dipandang melalui data kemiskinan di Indonesia, dapat dipastikan bahwa bagian terbesar penduduk yang miskin adalah yang bekerja di dalam sektor pertanian (Tambunan, 2003:23-24).

Berdasarkan Tabel 1.1, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu pusat produksi padi di Wilayah Jawa Timur yang berpotensi untuk pengembangan usahatani padi. Data dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten/kota dengan produktivitas komoditi padi tertinggi di Provinsi Jawa Timur di tahun 2017. Luas panen yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1 untuk produksi komoditas padi di Kabupaten Lamongan di tahun 2017 adalah sebesar 151.865 ha dengan produksi sebesar 924.933 ton dengan produktivitas 6,09 ton/ha.

Tabel 1.1
Kabupaten/Kota Penghasil Padi Tertinggi di Jawa Timur Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
Kab. Lamongan	151.865	924.933	6,09
Kab. Jember	163.093	916.992	5,62
Kab. Bojonegoro	157.980	852.669	5,40
Kab. Banyuwangi	121.166	776.367	6,41
Kab. Ngawi	133.485	759.721	5,69
Kab. Pasuruan	118.752	727.648	6,13
Kab. Tuban	97.534	567.398	5,82
Kab. Madiun	86.127	536.976	6,23
Kab. Nganjuk	91.878	522.374	5,69
Kab. Lumajang	79.060	450.396	5,70
Kab. Jombang	76.253	448.880	5,89
Kab. Gresik	67.964	445.430	6,55
Kab. Ponorogo	76.016	435.676	5,73
Kab. Malang	70.139	434.948	6,20
Kab. Bondowoso	85.015	418.656	4,92

Sumber : Dinas Pertanian Jawa Timur (2017)

Tingginya produksi padi di Kabupaten Lamongan ini salah satunya dikarenakan *input* faktor produksi seperti lahan/sawah, pupuk, obat-obatan, benih/bibit, permodalan dan tenaga kerja. Selain itu teknologi yang dipakai adalah alat atau mesin dan kegiatan operasional seperti bahan bakar minyak (BBM), perawatan dan upah operator dari proses produksi hingga ke pedagang. Komponen-komponen diatas ialah sebuah sistem usahatani padi yang terangkum dalam analisa usahatani atau struktur ongkos produksi dan menggambarkan harga-harga (biaya) serta kuantitas yang digunakan dalam tiap hektar lahan.

Struktur ongkos dalam analisa usahatani padi menurut Dinas Pertanian Kabupaten Lamongan (2017) merupakan komponen biaya produksi, yang terdiri dari: 1) bibit; 2) pupuk (Urea, ZA, TSP, Phonska, pupuk kandang/bokhasi/kompos); 3) pestisida (insektisida/fungisida/herbisida); 4) sewa lahan; 5) sewa alat (pompa air); 6) tenaga kerja, termasuk tenaga kerja keluarga (pengolahan tanah, traktor, bajak, cangkul, cabut bibit/benih, tanam, penyiangan, pemupukan, pengendalian OPT, panen dan pasca panen).

Kabupaten Lamongan dihadapkan pada fakta jika orientasi petani tanaman pangan yaitu padi masih berorientasi dengan minimalisasi biaya produksi dan belum dalam orientasi maksimalisasi keuntungan. Hadisapoetro dalam Antriyandarti (2012:12) mengungkapkan bahwa sering kali petani hanya menghitung biaya aktual yang digunakan untuk satu kali masa tanam, serta dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Jika pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada biaya maka petani menyimpulkan usahatani menguntungkan, begitupula sebaliknya.

Petani sebagian besar tidak melakukan perhitungan jumlah biaya dan pendapatan secara rinci tujuan usahatani hingga akhir terutama usahatani keluarga adalah pendapatan keluarga petani. Orientasi petani tersebut menyebabkan usahatani yang sebenarnya merugikan, tidak efisien serta tidak mempunyai daya saing tetap saja dijalankan oleh para petani. Apabila hal ini terus berlanjut maka bukan hal mustahil jika hasil tanaman pangan di Kabupaten Lamongan akan kalah bersaing dengan produk komoditas impor serupa sehingga usahatani yang ada perlu mempunyai daya saing. Sebuah komoditas dapat diukur daya saingnya melalui 2 pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang didapatkan dan efisiensi usahatani. Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Daya saing dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (Murtiningrum, 2013:15).

Keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Indikatornya dapat dihitung dengan alat Analisis Biaya Sumberdaya Domestik (BSD). Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk memperkirakan sumberdaya apa saja yang

dibutuhkan untuk memproduksi komoditas tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif dalam analisis BSD dapat dihitung menggunakan harga sosialnya, sedangkan keunggulan kompetitif dianalisis dengan menggunakan harga aktualnya (Andriani dan Hanani, 2010:68). Analisis BSD tidak dapat memperhitungkan pengaruh dampak divergensi serta kebijakan pemerintah di tiap komoditas usahatani. Dampak divergensi timbul salah satunya karena dari 2 sebab yakni kegagalan pasar atau distorsi kebijakan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah perlu untuk melihat kemungkinan apakah produksi komoditas di dalam negeri dapat bersaing di pasar global. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut tentang pengukuran daya saing, profitabilitas dan efisiensi komoditas usahatani dimana hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan metode *Policy Analysis Matrix* (PAM).

Policy Analysis Matrix (PAM) adalah metode analisis tentang *entry* pembukuan ganda yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan dalam mengatasi isu penting mengenai perkembangan kebijakan pertanian (Monke dan Pearson, 1989:14). PAM sering digunakan dalam mengukur dampak kebijakan pada daya saing serta tingkat keuntungan petani, investasi publik berpengaruh pada efisiensi sistem pertanian dan efek dari penelitian pertanian dan pertumbuhan pada efisiensi ekonomi dan keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif. PAM melakukan perhitungan pengaruh biaya, pengembalian produksi dan investasi proyek-proyek pertanian (Fatah, 2015:5).

Pendapatan dan biaya input usahatani akan menentukan seberapa besar tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan (*profitability*) usahatani. Efisiensi biaya dengan sumber daya dapat menentukan daya saing usahatani dalam menghasilkan komoditas dibandingkan dengan komoditas impor. Kebijakan pemerintah akan mempengaruhi tingkat *profit* dan daya saing usahatani komoditas tanaman pangan dalam hal ini padi. Faktor-faktor yang membutuhkan perhatian bagi pelaksana kebijakan tidak hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada subsistem agribisnis lainnya seperti penanganan panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, perdagangan, kebijakan subsidi harga *input*, *output* dan

perdagangan internasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul “Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Usahatani Padi di Kabupaten Lamongan”.

Penelitian ini menganalisis daya saing dan kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing usahatani padi di Kabupaten Lamongan, mengetahui tingkat keuntungan dan efisiensi usahatani padi di Kabupaten Lamongan serta mengetahui kebijakan pemerintah terhadap usaha tani padi di Kabupaten Lamongan. Sistematika penulisan diikuti oleh empat bab sebagai berikut, yaitu tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran.